

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

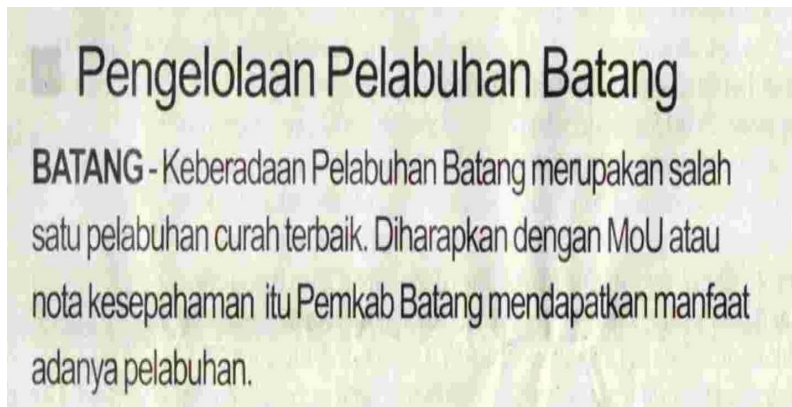
Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos/ Radar Semarang	Media Indonesia	Wawasan
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Kabupaten Batang

Halaman 21

Pemkab Batang Teken MoU dengan Kementerian Perhubungan



Melalui nota kesepahaman ini akan lebih ada kerja sama dan dukungan Pemkab lebih kreatif dan inovatif sehingga Pelabuhan Batang semakin baik dan berjalan positif sesuai rencana.

"Dengan kerja sama agar lebih bersinergi lagi dengan Pemerintah Pusat. Pemanfaatan Pelabuhan Batang sesuai dengan peruntukannya serta tidak menyalahi undang-undang yang berlaku," ujar Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan, Difa Oktaviana. sesuai menandatangani piagam kerjasama Kementerian Perhubungan dengan Pemkab Batang, ang berlangsung d Ruang Abirawa, Rabu (6/2).

Bupati Wihaji menuturkan, dengan adanya nota kesepahaman menjadi langkah kuntut menentukan kebijakan lanjutnya. Mendapatkan manfaat pelabuhan dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa harus menyalahi regulasi yang sesuai dengan fungsinya dan peruntukannya.

"Penandatanganan nota kesepahamannya itu sudah ditunggu selama satu tahun. Karena Pelabuhan Batang bagian dari penunjang transportasi laut yang memiliki potensi besar dan semangat baru untuk pertumbuhan industri dan ekonomi."

Dikatakan, pihaknya tidak memungkiri kalau di dunia laut dan pantai memang keras dan biayanya mahal. Maka dengan nota kesepahaman itu Pemkab Batang memiliki kewenangan untuk ikut meneribkannya.

"Orang akan datang menggunakan pelabuhan kalau biayanya murah. Memang murah di tapi lain- lainnya yang mahal, karena Pemkab Batang siap hadir meneribkannya," tandas Wihaji

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Batang, Muhammad Fahrudin mengatakan, Pelabuhan Curah Batang masuk katagori kelas III untuk kering dan basah. Pengelolaannya di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

"Selama masa uji coba pelabuhan sudah menyandarkan dalam satu bulan 10 kapal untuk bongkar muat pasir dan batu split dengan kapaitas kapal 2,7 fit atau 3.000 gross ton (GT) Adapun untuk operasional secara resminya menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah." (ar-45)

Melalui nota kesepahaman ini akan lebih ada kerja sama dan dukungan Pemkab lebih kreatif dan inovatif sehingga Pelabuhan Batang semakin baik dan berjalan positif sesuai rencana.

"Dengan kerja sama agar lebih bersinergi lagi dengan Pemerintah Pusat. Pemanfaatan Pelabuhan Batang sesuai dengan peruntukannya serta tidak menyalahi undang-undang yang berlaku," ujar Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan, Difa Oktaviana. sesuai menandatangani piagam kerjasama Kementerian Perhubungan dengan Pemkab Batang, ang berlangsung d Ruang Abirawa, Rabu (6/2).

Bupati Wihaji menuturkan, dengan adanya nota kesepahaman menjadi langkah kuntut menentukan kebijakan lanjutnya. Mendapatkan manfaat pelabuhan dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa harus menyalahi regulasi yang sesuai dengan fungsinya dan peruntukannya.

"Penandatanganan nota kesepahamannya itu sudah ditunggu selama satu tahun. Karena Pelabuhan Batang bagian dari penunjang transportasi laut yang memiliki potensi besar dan semangat baru untuk pertumbuhan industri dan ekonomi."

Dikatakan, pihaknya tidak memungkiri kalau di dunia laut dan pantai memang keras dan biayanya mahal. Maka dengan nota kesepahaman itu Pemkab Batang memiliki kewenangan untuk ikut meneribkannya.

"Orang akan datang menggunakan pelabuhan kalau biayanya murah. Memang murah di tapi lain- lainnya yang mahal, karena Pemkab Batang siap hadir meneribkannya," tandas Wihaji

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Batang, Muhammad Fahrudin mengatakan, Pelabuhan Curah Batang masuk katagori kelas III untuk kering dan basah. Pengelolaannya di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

"Selama masa uji coba pelabuhan sudah menyandarkan dalam satu bulan 10 kapal untuk bongkar muat pasir dan batu split dengan kapaitas kapal 2,7 fit atau 3.000 gross ton (GT) Adapun untuk operasional secara resminya menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah." (ar-45)